OTONOMI Vol. 9. No. 17, Februari 2016

ISSN 1979 - 7648

OTONOMI

JURNAL ILMU ADMINSTRASI

ISSN : 1979 - 7648

STIA TRINITAS -AMBON

KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Oleh:

Amtai Alaslan S.IP.,M.Si
(Dosen STIA Saumlaki)

Abstract

This study aims to determine how the ability of village government in the implementation of administrative duties in the village of North Tanimbar Keliobar District of West Southeast Maluku District. The study used a qualitative methodology by interviewing 11 informants from within the village and outside the village.

By using descriptive qualitative analysis obtained by the findings that the village government capacity in the implementation of quality of village administration tasks will depend on the responsibility to perform the tasks and cooperation between village officials who can be known through a process of performance evaluation management apparatus village.

Keywords: Ability Village Government and Government Administration Tasks

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan mewawancarai 11 informan yang berasal dari dalam desa dan luar desa.

Dengan menggunakan analisa kualitatif deskriptif diperoleh hasil penelitian bahwa kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas administrasi desa yang berkualitas akan sangat tergantung pada tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kerjasama antara aparatur desa yang dapat diketahui lewat sebuah proses manajemen evaluasi kinerja aparatur desa.

Kata kunci: Kemampuan Pemerintah Desa dan Tugas Administrasi Pemerintahan

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks dalam era globalisasi ini, membutuhkan peran Aparatur Pemerintahan baik dari Pusat sampai Desa yang berkompeten dalam posisi dan perannya sebagai pelayan publik. Aparatur Pemerintah Publik telah menjadi daya tarik untuk dicermati dan dikaji. Hal tersebut tidak saja dibahas oleh kalangan teoritis dan pemerhati, tetapi juga oleh para praktisi, bahkan telah menjadi isu publik (*public issues*) sehingga setiap orang tergerak untuk memikirkan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapinya.

Banyak masalah strategis yang dihadapi dalam pelayanan publik untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi serta kewenangan, dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya, disamping berasal dari kompleksitas masalah lingkungan dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Masalah tersebut yang dihadapi oleh pemerintah sekarang ini, baik di pemerintah pusat sampai pada pemerintahan di desa, yang muaranya lebih banyak diarahkan pada kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya. Pemerintah saat ini setidaknya berada dan berhadapan dengan masalah lingkungan strategis yang senantiasa berubah, pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, pemba-

ngunan dan layanan masyarakat serta kondisi masyarakat yang mengalami dinamika perubahan Widodo, (2006: 29).

Menghadapi dinamika masyarakat tersebut dan pergeseran sebagaimana disebutkan di atas, dituntut kemampuan aparat pemerintah desa yang profesional. Kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan termasuk di Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kemampuan aparat Pemerintah Desa Keliobar harus senantiasa harus dapat meningkatkan pelayanan yang baik pada masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Menghadapi kondisi sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, kemampuan Pemerintah Desa harus senantiasa mau dan mampu meningkatkan kemampuannya, agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Namun terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa belum optimalnya Pemerintah Desa Keliobar dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Desa Keliobar karena terbatasnya sarana dan prasarana penunjang roda Pemerintahan, terbatasnya SDM, kualitas kerja yang rendah, dan berbagai

pelayanan public yang belum maksimal dan kurang memuaskan masyarakat. Penelitian ini sebagai upaya untuk mengetahui persoalan-persoalan pelayanan public yang belum dapat berjalan dengan baik di Desa Keliohar Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

KERANGKA TEORI

Konsep Kemampuan Pemerintah Desa

Kemampuan Pemerintah Desa mempunyai banyak makna, menurut Jhonson dalam (Cece Wijaya, 1991 : 3) mengatakan bahwa “kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan”. Sedangkan kemampuan menurut Mohamda Zain dalam Milman (2010 : 10) mengartikan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Robbin (2007 : 57) kemampuan berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut, Robbin katakan bahwa kemampuan (*ability*) adalah sebuah penilaian terdiri atas apa yang dapat dilakukan seseorang.

Sesuai dengan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; Kemampuan intelektual (*intellectual ability*) yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental berfikir, menalar dan memecahkan masalah. Kemampuan fisik (*physycal ability*) yaitu

kemampuan melakukan tugas-tugas yang menurut stamina, ketrampilan, kekuatan dan karakteristik serupa. Steers dalam Rasyid, (1992 : 6) menyatakan bahwa kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang di dalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman.

Berdasarkan pandangan diatas dapat dijelaskan bahwa kemampuaann seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis pelatihan yang pernah mengikuti serta pengalaman yang dimilikinya. Secara konsepsional hal ini diperkuat dari pandangan Steers tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi apakah kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya. Salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi Desa

Administrasi Desa menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.

Administrasi desa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara

pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pemerintahan, seperti antara lain, baik dalam menggerakkan partisipasi dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok kepala desa yaitu :

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
- b) Pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelayanan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Menurut Zaitun (1990 : 3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu perumusan dan penetapan kebijakan umum; Kepemimpinan; Pengawasan; dan Koordinasi. Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti Pemerintah Desa sebagai bagian integral dari

pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu pelayanan kepada masyarakat; Fungsi operasional atau manajemen pembangunan dan fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe, 1996 : 99). Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat.

Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi kepala desa dan aparatnya adalah berusaha mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengolah organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya menurut Beratha (1992 : 37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah; (i) Tugas bidang pemerintahan; (ii) Tugas bidang pelayanan kepada masyarakat; (iii) Tugas bidang ketatausahaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan diperlukan hal-hal berikut:

- 1) Tugas bidang pemerintahan meliputi registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.
- 2) Tugas-tugas umum meliputi menerima dan melaksanakan intruksi-intruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis.
- 3) Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
- 4) Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
- 5) Melaksanakan kerja sama dengan instansi ditingkat desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah.
- 6) Tugas bidang pelayanan umum, meliputi: pemberian bermacam-macam izin, (izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan); memberikan macam-macam keterangan (bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer sebagai sumber observasi utama yang

diperoleh langsung dari informan kunci dan data sekunder yang diambil secara tidak langsung dari kajian terhadap berbagai literatur-literatur yang relevan dengan masalah penulisan.

Informan penelitian berjumlah 11 orang yang terdiri 1 orang Pegawai Kantor Kecamatan Tanimbar Utara (Kepala Seksi Pemerintah); 2 tokoh masyarakat; 2 tokoh agama; 2 tokoh adat; 2 tokoh pemuda serta; 2 anggota masyarakat, yang ditentukan oleh peneliti. Informan berasal dari dalam desa dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Umur /Usia, dengan pertimbangan semakin tinggi umur/usia informan, semakin banyak peristiwa atau kejadian yang dilihat, dirasakan dan dialami.
- (2) Lama berdomisili; Penduduk atau masyarakat yang telah lama berdomisili atau tinggal dan menetap pada lokus penelitian dapat dijadikan sebagai informan karena informasi serta data yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dirasakan.
- (3) Tokoh-tokoh di dalam desa seperti, tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat.

Informan dari luar desa yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah desa yaitu pemerintah kecamatan dari Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanimbar Utara.

Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data meliputi :

1. *Getting in*; diawali dengan membawa ijin formal penelitian dan mengadakan pendekatan terhadap objek penelitian, untuk menjelaskan rencana dan maksud kedatangan peneliti sehingga dari informasi tersebut penulis bisa melakukan penggalian data di desa Keliobar.
2. *Getting Along* yaitu melakukan hubungan secara langsung dan akrab dengan objek penelitian dan sebelum melakukan wawancara penulis menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan peneliti, sehingga mereka memahaminya.
3. *Logging Data* penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumen serta penelusuran data *On line*.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, menurut (Milles & Huberman dalam Moleong 2006 : 228) analisis data kualitatif dilakukan dengan langkah reduksi data, display data dan verifikasi dan kesimpulan. Teknik validitas data yakni teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu,

PEMBAHASAN

1. Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa.

a. Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Tugas

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Berdasarkan definisi di atas maka Tanggung jawab dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Keliobar kurang memiliki tanggung jawab yang baik dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Keliobar Ibu Ani Kofit bahwa “Pemerintah Desa melayani masyarakat dengan baik, misalnya jika masyarakat yang ingin mengurus surat keterangan KTP Sementara, surat keterangan tidak mampu atau surat-surat lainnya, maka masyarakat tersebut disuruh ke rental Bpk. O. Weridity untuk membuatnya baru dibawah ke Pemerintah Desa untuk ditanda tangani, dari situ saja sudah menandakan kalau Pemerintah Desa tidak bertanggung jawab dalam melayani masyarakat

padahal seharusnya Pemerintah Desa yang menyiapkan dan membuat surat-surat tersebut tanpa masyarakat harus ke rental untuk membuatnya.”)¹

Pernyataan ini didukung juga oleh keterangan salah satu tokoh masyarakat Desa Keliobar Bapak Soleman Batlayeri bahwa “Pemerintah Desa hanya mampu melakukan pelayanan hanya melalui teori tetapi dalam melaksanakan tugasnya dalam desa tidak mempunyai tanggung jawab sama sekali walaupun tanggung jawab itu dilakukan semata-mata hanya untuk menjamin kepentingan keluarga tertentu saja”).²

Hasil wawancara diatas menunjukkan Pemerintah Desa belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik seperti pada pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan administrasi seperti kartu keterangan tidak mampu, KTP sementara bagi yang belum mempunyai KTP maupun pembuatan administrasi lainnya yang telah di jelaskan dalam hasil wawancara tersebut diatas. Dijelaskan pula bahwa Pemerintah Desa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat tidak secara merata hanya kepada orang-orang tertentu saja seperti keluarga Kepala

Desa, keluarga para stafnya maupun yang memiliki ikatan emosional dengan Pemerintah Desa.

b. Semangat Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas

Semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai produktivitas yang maksimal” (Malayu SP. Hasibuan; 2004:94). Pengertian semangat kerja ini menunjukan semangat kerja adalah tingkah laku para karyawan yang bekerja dengan kondisi lebih optimal sehingga mencerminkan keadaan dimana organisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan semangat kerja yang tinggi merupakan suatu reaksi yang positif dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik, maka semangat kerja mempunyai pengaruh terhadap aktifitas perusahaan, sehingga perusahaan atau organisasi menginginkan karyawan yang mempunyai semangat kerja yang tinggi.

Hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Keliobar, Bapak Manase Lodar yang mengatakan bahwa “Kepala Desa dan perangkatnya bekerja dengan sebuah keinginan yang sungguh-sungguh. Itu tercermin dari disiplinannya pada setiap hari jam kerja”).³

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ani Kofit pada tanggal 16 Desember 2013

² Hasil wawancara dengan Bapak Soleman Batlayeri pada tanggal 13 November 2013

³ Hasil wawancara dengan Bapak Manase Lodar pada tanggal 4 Desember 2013

Keterangan yang sama juga gambarkan oleh tokoh Pemuda desa Keliobar, Bapak Jemilia Metalmety yang menerangkan bahwa “ada semangat kerja yang baik yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Keliobar selama melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa juga disiplin dalam masuk kantor.”)⁴

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa Pemerintah Desa Keliobar memiliki semangat kerja yang baik. Sikap itu ditunjukkan dengan kedisiplinan Pemerintah Desa Keliobar lewat jam kerjanya setiap hari di Kantor Desa.

c. Ketelitian Dalam Pelaksanaan Tugas

Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat desa Keliobar, Ibu Mery Yafur yang menggambarkan bahwa “Pemerintah Desa Keliobar cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya, misalnya nama-nama masyarakat yang dimasukan untuk mendapat bantuan beras miskin (Raskin), ternyata ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi belum diakomodir dalam daftar nama bantuan tersebut sebaliknya ada nama-nama yang mendapat bantuan adalah mereka yang dikategorikan masi mampu sehingga

Pemerintah Desa memutuskan untuk menggantikan nama-nama tersebut dengan mereka yang layak mendapatkan bantuan tersebut”).⁵

Dari keterangan hasil wawancara dengan informan di atas, menunjukan bahwa Pemerintah Desa Keliobar teliti dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti ketelitian dalam mendata nama-nama masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat salah satu bantuan dari pemerintah yaitu raskin.

d. Kerjasama Dalam Pelaksanaan Tugas

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Menurut Zainudin (2009), kerjasama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai, dan adanya norma yang mengatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerja sama antar Pemerintah Desa dengan masyarakat maupun antar internal Pemerintah Desa sendiri belum maksimal.

Hal ini sesuai dengan penjelasan salah satu tokoh adat, Bapak manase

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jemilia Metalmety pada tanggal 15 Desember 2013

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Mery Yafur pada tanggal 02 Desember 2013

Lodar yang mengatakan bahwa “kerjasama antar Pemerintah Desa dan masyarakat sudah tidak baik karena hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa itu disebabkan karena kurang adanya faktor kejujuran, kenetralan dan keadilan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat”).⁶

Keterangan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan tokoh agama, Bapak Sinus Naressy yang menyatakan bahwa “pengorganisasian aparatur Pemerintah Desa sudah dibentuk sesuai aturan namun, aparatur desa yang dibentuk tidak dapat bekerja secara maksimal sesuai job masing-masing akibatnya timbul saling curiga mencurigai antar sesama aparatur desa sehingga mengakibatkan hilangnya kerjasama antar aparatur desa dan juga hilangnya rasa saling menghargai di antara masyarakat dan Pemerintah Desa”).⁷

Hal ini lebih dipertegas dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanimbar Utara, Bapak Ronald Kuway yang mengatakan bahwa “kerjasama itu sebenarnya sangat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi Pemerintah Desa Keliobar dalam hal

kerjasama belum maksimal karena penyampaian laporan yang terkait dengan kepentingan desa sendiri terlambat disampaikan ke kecamatan itu menandakan bahwa kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Desa Keliobar masih sangat lemah dalam mempersiapkan laporan-laporan tersebut”).⁸

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa kerja sama antar Pemerintah Desa dengan masyarakat maupun antar internal Pemerintah Desa sendiri belum berjalan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya keterbukaan atau transparansi penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam hal penggunaan anggaran pembangunan. Seperti penggunaan anggaran pembuatan jalan setapak di dalam desa tidak disebutkan berapa besar anggarannya kepada masyarakat. Selain itu, sisa penggunaan anggaran tersebut juga tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Hal ini yang menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa sehingga kerja sama antar Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi tidak baik. Kerjasama antar para staf juga belum

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Manase Lodar pada tanggal 4 Desember 2013

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sinus Naressy pada tanggal 20 November 2013

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanimbar Utara, Bapak Ronald Kuway, S.Sos pada tanggal 19 Desember 2013

berjalan sebagaimana mestinya seperti yang disampaikan oleh pihak kecamatan terkait dengan penyampaian laporan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Desa Keliobar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pemerintah Desa Keliobar seharusnya dapat menciptakan suatu hubungan yang baik dengan masyarakat maupun didalam internal Pemerintah Desa sendiri lewat keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan maupun penggunaan anggaran pembangunan desa. Dengan demikian maka dapat menimbulkan rasa peduli masyarakat masyarakat dalam mendukung setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Keliobar, Sehingga kerjasama yang baik tersebut dapat ditingkatkan untuk pembangunan desa Keliobar kearah yang lebih baik.

e. Kemampuan Dalam Menyelesaikan Tugas

Kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Jhonson dalam (Cece Wijaya, 1991:3). Hasil wawancara dengan salah seorang anggota masyarakat Desa Keliobar Bapak Emaus Larat yang mengatakan bahwa "kemampuan Pemerintah Desa untuk menyelesaikan tugasnya belum sesuai

dengan apa yang diharapkan karena kurang adanya faktor kejujuran dan keadilan. Lanjutnya, salah satu bukti adalah Pemerintah Desa tidak mampu dalam hal pembuatan atau menyiapkan keterangan-keterangan atau surat-surat dari desa kalau ada masyarakat yang membutuhkannya. Mereka justru disuruh ke rental untuk membuatnya walaupun pemerintah desa yang membuatnya maka masyarakat harus menebusnya dengan membayar, mulai dari harga Rp.10.000 sampai Rp.25.000 per surat".⁹⁾

Pendapat ini diperkuat dengan keterangan salah seorang tokoh pemuda, Bapak Dominggus Feninlambir yang mengatakan bahwa "selama ini Pemerintah Desa Keliobar belum sepenuhnya memiliki kemampuan yang cukup dalam menyelesaikan tugasnya karena ada tugas-tugas yang sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan. Antara lain KTP dan akte kelahiran masyarakat yang diurus oleh Pemerintah Desa yang sudah lebih dari 7 bulan belum semuanya didapat walaupun ada masyarakat yang sudah mendapatkan surat-surat tersebut karena memiliki kedekatan emosional dengan pemerintah desa.)"¹⁰⁾

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Emaus Larat pada tanggal 05 Desember 2013

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dominggus Feninlambir pada tanggal 16 Desember 2013

Hasil wawancara diatas menunjukkan aparaturnya Pemerintah Desa Keliobar belum memiliki kemampuan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat karena sebagai pelayan masyarakat pemerintah desa diharuskan untuk dapat menjalankan kewajibannya untuk dapat melayani masyarakatnya dengan sebaik-baiknya (*exelent service*) tanpa adanya unsur ketidakadilan dan ketidakjujuran. Seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara antara penulis dan informan di atas bahwa Pemerintah Desa Keliobar tidak dapat menerapkan sebuah pelayanan prima (*exelent service*) kepada masyarakat, seperti pembuatan KTP sementara, surat keterangan tidak mampu dari desa maupun keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Desa Keliobar. Lebih paranya lagi, masyarakat harus membayar biaya administrasi kepada Pemerintah Desa Keliobar mulai dari Rp.10.000 – Rp.25.000 jika itu semua disiapkan oleh pemerintah desa dan Cuma untuk memperoleh pengesahan dari Pemerintah Desa Keliobar berupa penandatanganan surat-surat tersebut. Seperti lagi KTP dan Akte Kelahiran dari masyarakat yang akan diurus oleh Pemerintah Desa atas dasar inisiatif Pemerintah Desa sendiri sampai sekarang sebagian masyarakat belum

mendapatkannya. Ini menjadi keresahan masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang sudah mendapat tetapi ada sebagian besar juga yang belum mendapat padahal sudah 7 bulan lamanya mereka menunggu tetapi belum selesai-selesai juga. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Keliobar belum jujur dan adil dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Pemerintah Desa Keliobar juga belum mampu dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

f. Inisiatif Selama Melaksanakan Tugas

Menurut Suryana (2006:2) mengungkapkan bahwa “Inisiatif adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah(*thinking new things*). Berkaitan dengan definisi ahli di atas maka pengertian Inisiatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam usaha memecahkan suatu masalah.

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama, Bapak Justus Ngelia mengatakan bahwa “inisiatif yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Keliobar sangat baik karena banyak kebijakan

yang dibuat itu demi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Desa menyampaikan kepada masyarakat yang belum memiliki KTP maupun Akte Kelahiran supaya mendaftarkan diri di kantor desa (rumah pribadi kepala desa) untuk nantinya diurus oleh Pemerintah Desa sehingga tidak memberatkan masyarakat dalam hal biaya maupun pengurusan di kantor kecamatan”).¹¹

Keterangan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, Ibu Ani Kofit yang mengatakan bahwa “inisiatif atau langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Desa adalah untuk membangun desa dan untuk membantu masyarakat.”)¹²

Keterangan-keterangan dari informan diatas menunjukkan bahwa ada inisiatif yang baik dari Pemerintah Desa Keliobar untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. Inisiatif yang diambil oleh Pemerintah Desa selain membantu masyarakat juga mempermudah masyarakat dalam pengurusan-pengurusan sehingga masyarakat tidak direpotkan dengan proses yang panjang dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

g. Kualitas Hasil Pekerjaan

Kualitas adalah segala yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*). (Gaspersz, 2004). Jika dikaitkan dengan definisi di atas maka hasil penelitian seperti yang digambarkan oleh salah seorang tokoh adat Desa Keliobar, Bapak Justus Metalmety mengatakan bahwa “kualitas atau mutu hasil pekerjaan dari Pemerintah Desa Keliobar hampir tidak dapat dipastikan karena belum menyentuh atau menjawab kebutuhan masyarakat.”)¹³

Dijelaskan pula oleh seorang masyarakat Desa Keliobar Ibu Mery Yafur yang menerangkan bahwa “saya menilai mutu pekerjaan Pemerintah Desa Keliobar selama ini belum maksimal karena apa yang dikerjakan itu belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah pembuatan jalan setapak didalam kampung. Anehnya belum selesai pengerjaan jalan tersebut tetapi sudah ada yang rusak walaupun itu baru saja dibuat. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum maksimal dalam bekerja”).¹⁴

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa hasil pekerjaan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Justus Ngelia pada tanggal 08 November 2013

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Ani Kofit pada tanggal 11 November 2013

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Justus Metalmety pada tanggal 08 Desember 2013

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Mery Yafur pada tanggal 02 Desember 2013

Pemerintah Desa Keliobar hampir tidak dapat dipastikan kualitasnya karena apa yang dilakukan belum memenuhi serta menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Keliobar juga belum dapat bekerja secara maksimal dalam mengerjakan setiap program maupun kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pembuatan jalan setapak didalam desa yang baru saja diselesaikan tetapi ada sebagian jalan yang telah rusak. seharusnya ada sebuah perencanaan awal yang baik dari Pemerintah Desa dalam melakukan setiap kegiatan yang ada di desa sehingga output atau hasil pekerjaan tersebut dapat menjawab input yang diberikan dan akhirnya bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat.

h. Evaluasi Dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan - tujuan program telah dicapai. (Gronlund, 1975)

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh adat desa Keliobar, Bapak Justus Metalmety yang menerangkan bawah “Pemerintah Desa tidak pernahh melakukan evaluasi terkait dengan program-program dan kegiatan yang telah dilakukan. Lanjutnya, bahwa

Pemerintah Desa selama ini tidak pernahh melakukan evaluasi terkait dengan salah satu kegiatan yaitu pertanggung jawaban penggunaan subsidi desa kepada BPD maupun masyarakat, jadi tidak tahu itu dipakai untuk apa saja padahal itu sangat penting bagi masyarakat”).¹⁵

Pernyataan tersebut didukung oleh keterangan yang disampaikan oleh salah seorang tokoh agama Bapak Sinus Naressy yang mengatakan bahwa “setiap program yang dilaksanakan di desa sama sekali tidak ada evaluasi pemerintah desa tentang hasil pekerjaan tersebut dengan masyarakat. Lanjutnya, pekerjaan jalan setapak yang telah selesai dikerjakan itu tidak dievaluasi tentang sisa anggarannya dan kenapa baru selesai dikerjakan saja sudah rusak lagi ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa kurang jeli dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.”)¹⁶

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan diatas diketahui bahwa Pemerintah Desa Keliobar tidak pernah melakukan evaluasi terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam desa untuk mengetahui sejauh mana pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti pekerjaan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Justus Metalmety pada tanggal 08 Desember 2013

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sinus Naressy pada tanggal 20 November 2013

jalan setapak yang menjadi salah satu program Pemerintah Desa Keliobar yang baru selesai dikerjakan tetapi ada sudah rusak. Ini tidak pernah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Desa dan juga, anggaran yang diperuntukan untuk pembuatan jalan setapak tersebut tidak dilakukan evaluasi untuk mempertanggung jawabkan sisa dari anggaran pembuatan jalan setapak tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa tidak melakukan evaluasi kepada BPD maupun kepada masyarakat tentang penggunaan subsidi desa sehingga masyarakat tidak mengetahui untuk apa saja penggunaan subsidi desa Keliobar.

2. Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi

a. Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dan di atas, menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Desa Keliobar Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan masih sangat lemah, Berdasarkan keterangan di atas, maka hasil analisis peneliti dapat disampaikan kepada Pemerintah Desa agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya seperti : (i) Menyelesaikan Surat Permohonan Pindah ke luar

daerah; (ii) menyelesaikan Surat Keterangan KTP Sementara; (iii) Menyelesaikan Surat Keterangan Tidak Mampu (Masyarakat Miskin) yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Keliobar juga harus meningkatkan kinerja melalui motivasi dalam bentuk kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan dalam melaksanakan pekerjaan dan harus ada kesanggupan untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh masyarakat kepadanya karena tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (*keharusan*) untuk dilaksanakan dalam tugas pemerintahan.

b. Kerja Sama Dalam Melaksanakan Tugas

Pemerintah Desa dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas melalui kerjasama yang baik antara internal Aparatur Pemerintah Desa dan juga antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sehingga masing – masing memiliki tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan administrasi seperti Kurang melaksanakan Kerjasama dengan unsur – unsur di desa Keliobar Jadi, dalam kerjasama harus dimunculkan rasa kesadaran memiliki (*sense of belonging*), sehingga melahirkan rasa bertanggung

jawab (*sense of responsibility*) atas apa yang telah disepakati dalam kerjasama.

c. Kemampuan dalam Menyelesaikan Tugas

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah digambarkan di atas, maka analisis penulis adalah Pemerintah Desa Keliobar memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa Keliobar adalah sebagaimana menciptakan kehidupan *demokratik*, memberikan pelayanan sosial dan pelaksanaan pembangunan yang baik sehingga dapat membawahi masyarakat Desa Keliobar pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, Pemerintah Desa Keliobar dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang berorientasi pada pelayanan dan pembangunan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja Pemerintah Desa Keliobar benar-benar makin mengarah pada *good local governance*.

d. Kualitas Hasil Pekerjaan

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sesuai dengan kualitas hasil pekerjaan yang begitu rendah oleh

Pemerintah Desa Keliobar seperti yang telah digambarkan di atas, maka yang menjadi analisis peneliti untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dapat meningkatkan kualitas hasil dari pekerjaannya dalam memberikan pelayanan administrasi dan pembangunan secara efektif dan efisien kepada masyarakat maupun dalam melaksanakan hasil – hasil pembangunan di dalam desa, sehingga dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat karena inti dari kualitas kerja adalah suatu hasil capaian kerja yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran Pemerintah Desa dengan baik dan berdaya guna.

3. Evaluasi Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah digambarkan di atas, maka analisis penulis adalah Pemerintah Desa Keliobar dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan di desa senantiasa harus selalu melakukan evaluasi secara berkalah dan rutin untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau pencapaian target dari suatu program dan kegiatan yang telah dilakukan serta dapat mengetahui apakah semua program dan kegiatan yang telah dilakukan sudah menjawab akan kebutuhan

masyarakat atau belum sehingga dari hasil evaluasi tersebut, maka Pemerintah Desa Keliobar dapat menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik, karena evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktifitas dalam melaksanakan programnya.

Selain itu, evaluasi dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan tentang pelayanan publik juga menjadi sangat penting karena evaluasi kemampuan aparat pemerintah memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik, hasil pelaksanaan administrasi dan laporan-laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas. Melalui evaluasi Pemerintah Desa Keliobar akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai dan bagaimana hasil yang akan dicapai ke depan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kemampuan aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan sangat tergantung pada rasa tanggung jawab Pemerintah Desa Keliobar dalam melaksanakan tugas.
2. Kemampuan aparat pemerintahan desa akan terbangun jika adanya kerja sama yang baik antar aparat desa.
3. Diperlukan optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen evaluasi untuk

mengetahui kinerja aparat pemerintah desa Keliobar.

Saran

Pemerintah Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, hendaknya:

1. Secara intensif melakukan upaya-upaya perbaikan dalam proses kerjasama yang baik di dalam internal Pemerintah Desa sendiri, antara Pemerintah Desa dengan unsur-unsur desa maupun antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan didalam Desa Keliobar dapat berjalan dengan baik.
2. Meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan maupun menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas hasil pekerjaannya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di dalam Desa Keliobar.
4. Memperhatikan evaluasi kinerjanya secara berkala dan kontinyu agar dapat mengetahui kekurangan serta kelebihan kinerjanya.
5. Perlu adanya kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Desa Keliobar.

DAFTAR PUSTAKA

- Siagian, SP. 1991. *Administrasi Pembangunan*, Haji Masagung. Jakarta.
- Amrin, Tatang M. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Press J.
- Beratha, I Nyoman. 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*, Ghalia Indonesia.
- Bintoro Tjikroamidjodjo, 1987. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Gill Mc. E, 1982. *Pengembangan Organisasi*, Jakarta Pustaka Pasindo.
- Islamy M.Irfan. 1998. *Kebijakan Publik*, Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 1992. *Pemerintahan dan Kepemimpinan*, Rajawali Press.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), 1979. *Landasan dan Pedoman Penyelenggaraan Administrasi negara R.I*, Jakarta.
- Lukman, Sampara. 1999. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA LAN Press.
- M. Habib Mustopo, 1989. *Ilmu Budaya Dasar Usaha Nasional Indonesia*. Surabaya.
- Maskun, Sumitro. 1993. *Pembangunan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: PT Media Madya Mandala.
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Refisi*, Bandung : Resdakarya.
- _____, 1999. *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Desa*, Bandung : Resdakarya.
- Rasyid, M. 1992. *Pembangunan Kualitas dan Usaha-usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah*, Universitas Tadulako Palu.
- Saparin, Sumber. 1996. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti, 1995. *Sumver Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. bandung : Ilham Jaya.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1984. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES.
- Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABET.
- Surjadi. 2003. *Manajemen Kepegawaian Negara*, Jakarta Revisi LAN RI.
- Suryaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjiptoherianto, Prijono. 1993. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*, Prisma.
- Widjaya, AW. 1992. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Rajawali Press.
- Wijaya, HAW. 2003. *Pemerintah Desa/Marga. Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Suatu Telaah Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. Dharma Bhakti. Jakarta.
- Undang-undang No 06 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001, *tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa*.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 *tentang Pedoman Administrasi Desa*.